

BAB I

Pendahuluan

I.1 Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat telah menyandang predikat *superpower* lebih dari dua dekade. Predikat tersebut tidak diberikan tanpa alasan, namun diberikan karena dalam hubungan antar negara dan dalam lingkup dunia internasional sudah sekian lama Amerika Serikat (selanjutnya disebut AS) menjadi negara yang mendominasi segala bidang mulai teknologi, politik, ekonomi hingga militer. Pada dasarnya seluruh penjuru dunia memandang bahwa AS merupakan negara yang memiliki tingkat kapasitas di atas negara lain dan hampir tidak tertandingi oleh negara-negara lain dalam berbagai aspek seperti teknologi, ekonomi bahkan politik, namun diantara aspek-aspek tersebut, kekuatan militer merupakan salah satu bidang yang menjadi tolak ukur penting negara-negara di dunia dalam memberikan predikat *superpower* bagi AS. Kekuatan militer AS menjadi yang terbesar pada tahun 2015 dan hal ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Statistik mengatakan bahwa dengan anggaran militer mencapai nilai 581 Milyar USD, AS menempati peringkat pertama dalam kategori negara dengan anggaran militer terbesar di dunia disusul berurutan oleh Cina, Arab Saudi dan Rusia.¹ Atas kekuatan militer terbesar di dunia tersebut, AS menjadi negara yang sangat berkonsentrasi pada keamanan dunia.

¹ rzn/vlz. 2015. *Kekuatan Militer Terbesar 2015*. Deutsche Welle, Rubrik. Tersedia Dalam: <http://www.dw.de/kekuatan-militer-terbesar-2015/g-18251030>

Terkait dengan konsentrasi pada keamanan dunia tersebut, sejak tahun 2001 pasca serangan teroris yang dikenal dunia dengan sebutan 9/11, AS yang pada saat itu berada di pemerintahan George W. Bush mendeklarasikan *War on Terrorism* sebagai kepentingan sekaligus kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri tersebut membuat AS sangat berkonsentrasi pada kawasan *Middle East* (Timur Tengah) selama hampir 10 tahun. Akan tetapi sejak memasuki awal 2010 tepatnya ketika kursi presiden telah berpindah pada Barrack Obama, konsentrasi AS di Timur Tengah tampak berkurang dan mengalami pergeseran yang semula berada pada kawasan Timur Tengah bergeser pada kawasan Asia.² Pergeseran tersebut semakin tampak ketika AS melakukan perubahan fokus yang disebut sebagai *Asia Pivot* (Poros Asia).³

Pergeseran konsentrasi yang awalnya berada pada kawasan Timur Tengah kepada kawasan Asia tersebut terlihat tidak relevan apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang dicetuskan sendiri oleh pemerintah AS pada 2001 yakni implementasi dari *War on Terrorism* menitik-beratkan kawasan Timur Tengah, dimana hal tersebut berarti menjadikan kawasan selain Timur Tengah terutama Asia (baik Asia Timur maupun Asia Tenggara) sebagai *second front* atau kawasan dengan tingkat prioritas kedua.⁴

Berkaitan dengan status pemetaan *second front* tersebut, memasuki tahun 2009 status *second front* disinyalir mengalami perubahan di saat berbagai

² Stephen Hoadley dan Jurgen Ruland. 2006. *Asian Security Reassessed*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Publications.

³ Manuel Mogato. 2015. *The US Wants Access To Philippine Military Bases As It Shifts Forces To Asia*. Reuters. Tersedia Dalam: <http://www.businessinsider.com/r-united-states-seeks-access-to-philippine-bases-as-part-of-asia-pivot-2015-4#ixzz3YUGwzajV>

⁴ Stephen Hoadley dan Jurgen Ruland. 2006. *Asian Security Reassessed*.

implementasi dari perubahan kebijakan mulai tampak di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Sebagai kawasan kedua yang diprioritaskan oleh AS, Asia tetap mengalami perkembangan dalam bidang ekonomi hingga politik tak terkecuali kekuatan militer. Ketika AS sibuk dengan segala agenda di kawasan Timur Tengah, Asia mencatatkan peningkatan kekuatan militer yang signifikan dalam 10 tahun terakhir.⁵ Dari sekian negara Asia yang terus mengalami peningkatan kekuatan militer tersebut, Cina merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dan paling menyita perhatian AS. Hal tersebut membuat AS mulai mengalihkan perhatiannya pada kondisi dan situasi yang sedang berkembang di kawasan Asia terutama Asia Tenggara dimana terdapat sebuah isu yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara dan Cina, yakni konflik sengketa Laut Cina Selatan.

Dua tahun setelah resmi menjabat sebagai Presiden AS, Barack Obama secara terbuka menyampaikan pentingnya kawasan Asia Pasifik sebagai kebijakan militer AS serta menyatakan bahwa kawasan Asia dan Pasifik adalah kawasan prioritas. Pentingnya kawasan tersebut disampaikan dalam kunjungan resmi Barack Obama di Canberra, Australia pada November 2011 di depan perdana menteri saat itu Julia Gillard serta Tony Abbot dalam kapasitasnya sebagai pemimpin oposisi pada saat itu.⁶ Perlu dicatat bahwa Tony Abbot kemudian

⁵ Deutsche Welle, *Kekuatan Militer Terbesar 2015*. [online]. Tersedia Dalam: <http://www.dw.com/id/kekuatan-militer-terbesar-2015/g-18251030>

⁶ The Whitehouse. Office of the Press Secretary. Remarks By President Obama to the Australian Parliament. www.whitehouse.gov [online]. Tersedia Dalam: <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>
Lihat juga Garbis Avakian. 2013. *Social Impact of Rotation of Up to 1,100 US Marines And Associated Equipment In Northern Australia*. Report from the Department of Defence. US Force

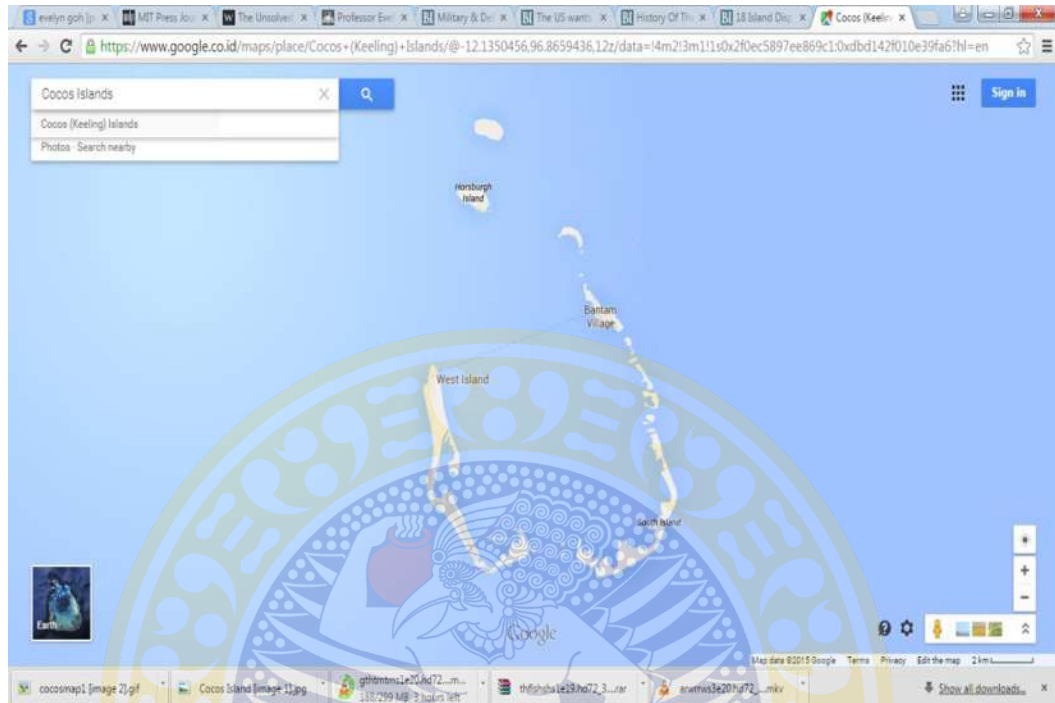
menggantikan Kevin Rudd sebagai perdana menteri dua tahun setelah kunjungan tersebut tepatnya pada September 2013.

Pentingnya kawasan Asia dan Pasifik memunculkan sebuah babak baru yakni sebuah pergeseran fokus kawasan yang sebelumnya berada pada kawasan Timur Tengah menjadi bergeser pada kawasan Asia Pasifik. Pergeseran tersebut semakin jelas terjadi saat pada akhir 2011 ketika AS memulai mobilisasi kekuatan barunya di kawasan Samudera Hindia sekaligus tepat di kawasan Asia Tenggara. Wilayah tersebut dikenal dengan nama Cocos (Keeling) Islands. Cocos (Keeling) Islands merupakan wilayah bagian dari Australia sekaligus satu-satunya pulau yang termasuk dalam wilayah kedaulatan Australia yang berada di kawasan Asia Tenggara. AS mencanangkan sebuah program baru yakni mengoperasikan sebuah kekuatan militer pada Cocos (Keeling) Islands. Penggunaan Cocos Islands sebagai basis militer baru milik AS telah dinyatakan resmi pada 2012 oleh menteri pertahanan Australia, Stephen Smith.⁷

Posture Review Implementation Team Department of Defence. 10 April 2013. Deloitte Acces Economics Pty. Ltd.

⁷ The Australian. 2012. *Cocos Confirmed as Pivotal Military Base. The Airfield at remote Cocos Islands Has Been Confirmed as a Future Base For US and Australian Surveillance Drones And Maritime Patrol Aircraft.* The Australian. National Affairs. [online]. Tersedia Dalam: <http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/defence/cocos-confirmed-as-pivotal-military-base/story-e6frg8yo-1226346265696?nk=3feefcf7e6af9fa8d4c23c6a7cb5d7cd>

Gambar Bab I.1: Cocos (Keeling) Islands. Cocos (Keeling) Islands.



Sumber: [https://www.google.co.id/maps/place/Cocos+\(Keeling\)+Islands/@-12.1350456,96.8659436,12z/data=!4m2!3m1!1s0x2f0ec5897ee869c1:0xdbd142f010e39fa6?hl=en](https://www.google.co.id/maps/place/Cocos+(Keeling)+Islands/@-12.1350456,96.8659436,12z/data=!4m2!3m1!1s0x2f0ec5897ee869c1:0xdbd142f010e39fa6?hl=en)

Kronologi penggunaan Cocos Islands sebagai pangkalan militer AS terlihat telah dimulai pada tahun 2011 dan terus berlanjut pada April 2012, ketika kontingen pertama dari personel angkatan laut AS yang berjumlah 200 personel telah mendarat di Australia.⁸ Pengiriman pasukan tersebut terus berlanjut dengan target mencapai 2500 personel *Marine Air Ground Task Force* (MAGTF) yang

⁸ Anna Mulrine. 2012. *Keeping An Eye On China? First US Marines Arrive In Australia*. CSMonitor.com [online]. Tersedia dalam: <http://www.csmonitor.com/USA/Military/2012/0404/Keeping-an-eye-on-China-First-US-Marines-arrive-in-Australia>

akan dikirimkan dalam beberapa bulan ke depan.⁹ Khususnya dalam kurun waktu 6 bulan terhitung sejak kontingen pertama dikirimkan, dalam periode April 2012 hingga Oktober 2012, AS mengirimkan personel militer yang berpusat pada wilayah utara Australia.¹⁰

Kemudian pengiriman kontingen selanjutnya yang diperkirakan berjumlah 250 personel dilakukan pada musim kemarau pada akhir 2012 hingga awal 2013.¹¹ Setelah itu, dalam kurun waktu 1 tahun setelah kontingen pertama dikirimkan tepatnya pada Oktober 2012, Cocos Islands telah beraktifitas layaknya sebuah pangkalan militer aktif dan tercatat terdapat 1,100 personel.¹²

Perencanaan penggunaan Cocos Islands sebagai basis militer AS sebenarnya telah diungkapkan oleh pihak pemerintah AS sendiri sejak awal tahun 2011. Satu minggu setelah agenda kunjungan Sembilan hari pada kawasan Asia Pasifik pada akhir 2011, Obama menjadwalkan kunjungan 27 jam khusus untuk menuju ke Darwin dalam rangka bertemu langsung dengan perdana menteri Australia Julia Gillard dalam rangka pembahasan pengiriman personel militer AS ke Australia.¹³ Bahkan diketahui bahwa sebelum pengiriman kontingen angkatan

⁹ Anna Mulrine. 2012. *Keeping An Eye On China? First US Marines Arrive In Australia*.

Lihat juga, Alison Rourke & Jonathan Watts. 2011. *China Uneasy Over US Troop Deal in Australia*. The Guardian [online]. Tersedia Dalam: <http://www.theguardian.com/world/2011/nov/16/china-us-troops-australia>

¹⁰ Alison Rourke & Jonathan Watts. 2011. *China Uneasy Over US Troop Deal in Australia*

Lihat juga Garbis Avakian. 2013. *Social Impact of Rotation of Up to 1,100 US Marines And Associated Equipment In Northern Australia*.

¹¹ Garbis Avakian. 2013. *Social Impact of Rotation of Up to 1,100 US Marines And Associated Equipment In Northern Australia*.

¹² Avakian. *Social Impact of Rotation of Up to 1,100 US Marines And Associated Equipment In Northern Australia*.

¹³ David Nakamura & Wan, William. 2011. *Obama Heads To Asia With Sharp Focus On China's Growing Power*. The Washington Post. Asia & Pacific [online]. Tersedia Dalam:

laut pertama AS ke Australia, pihak AS telah memperkenalkan konsep strategi militer baru yakni *Air Sea Battle Concept*.¹⁴ Konsep tersebut dirancang untuk sebuah pangkalan militer yang bertujuan untuk memberikan tandingan terhadap ‘*anti-acces*’ dan ‘*area denial*’ senjata.¹⁵ Konsep strategi tersebut merupakan sebuah strategi perang laut yang relevan untuk diterapkan pada sebuah pangkalan militer angkatan laut sejenis wilayah kawasan Cocos Islands.

Gambar Bab I.2: *Central Intelligence Agency map of Cocos (Keeling) Islands.*



http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/obama-heads-to-asia-with-sharp-focus-on-chinas-growing-power/2011/11/10/gIQA0sQkBN_story.html

Lihat juga *The Whitehouse.Office of the Press Secretary*. Remarks By President Obama to the Australian Parliament. www.whitehouse.gov [online]. Tersedia dalam : <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>

¹⁴ Peter Ford. 2011. *China Gives Cool Response to US Military Activity in Australia*. The Christian Science Monitor [Online]. World, Asia Pasific.

¹⁵ Peter Ford. 2011. *China Gives Cool Response to US Military Activity in Australia*.

Sumber: Kopp Carlo. 2013. *Strategic Potentially of the Cocos Islands and Christmas Islands*. Air Power. Defence Today, Defence Capabilities & Homeland Security, pdf. Strike Publications Pty Ltd – PO Box 27 Amberley Qld 4306 – 07 3282 9019.

Cocos Island memiliki lokasi yang tepat berada di perbatasan langsung kawasan Asia khususnya kawasan Asia Tenggara serta berbatasan langsung dengan lokasi sebuah isu kawasan yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara yakni konflik sengketa Laut Cina Selatan. Mengingat lokasi dari Cocos Islands yang berada di Samudera Hindia dan berada di kawasan Asia Tenggara, maka pulau ini memiliki nilai strategis sebagai sebuah pangkalan militer yang berorientasi pada pengawasan dan *fast responsive action*.¹⁶ Terlebih lagi, pada dasarnya sebuah pulau beserta segala isi yang terkandung di dalamnya adalah merupakan sebuah fokus ketegangan politik bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.¹⁷

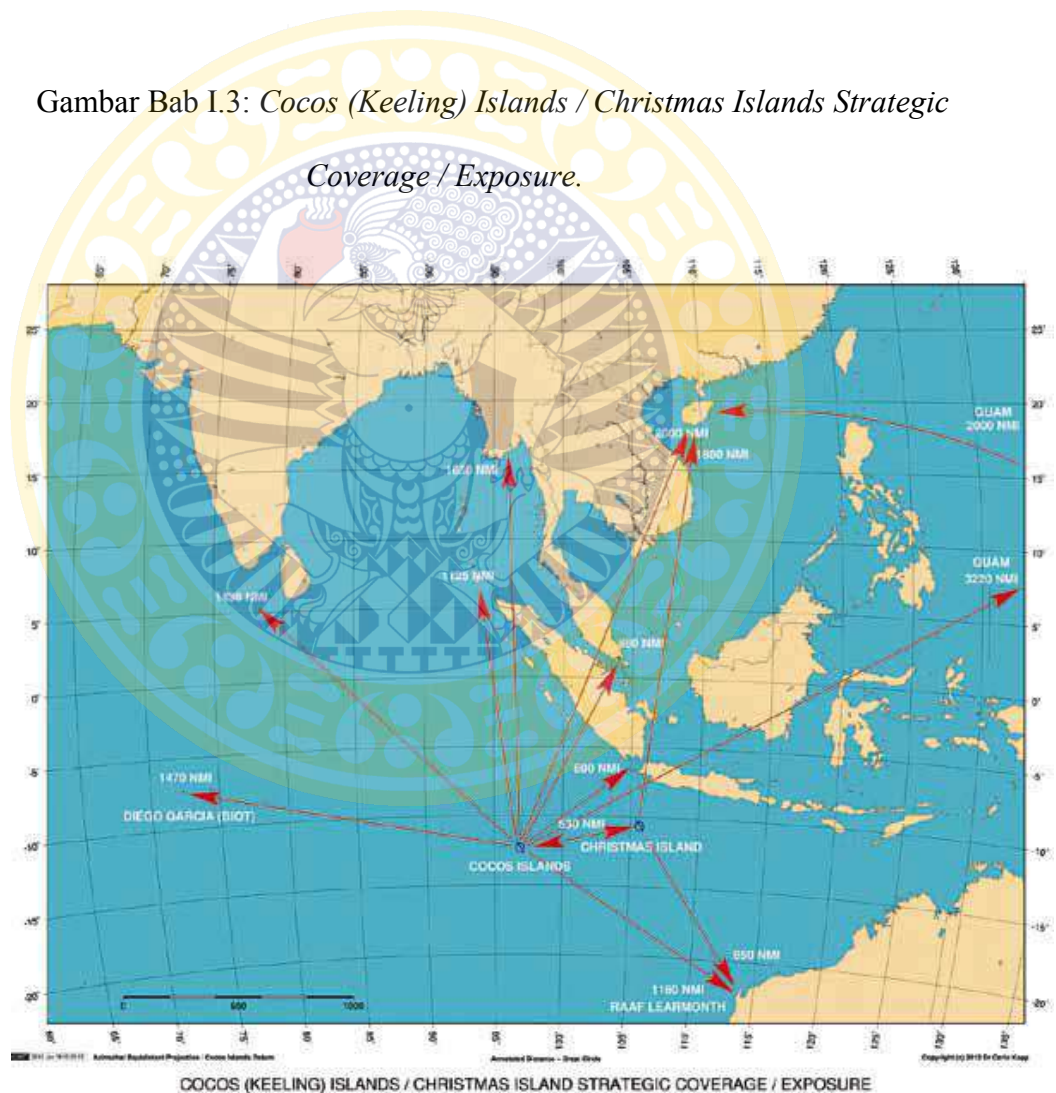
Apabila dilihat melalui sudut pandang kawasan Asia Tenggara, posisi geografi Cocos Islands tepat berseberangan langsung dengan perbatasan salah satu wilayah kedaulatan negara anggota ASEAN yakni Indonesia. Hal tersebut berarti Cocos Islands merupakan pintu yang sempurna untuk memasuki kawasan Laut Cina Selatan. Bahkan apabila ditarik garis lurus perbandingan jarak, maka jarak

¹⁶ The Australian. 2012. *Cocos Confirmed as Pivotal Military Base*. Lihat juga Philip Coorey. 2012. *US Military Eyes Cocos Islands As A Future Indian Ocean Spy*. The Sydney Morning Herald. Federal Politics. [online]. Tersedia Dalam : <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/us-military-eyes-cocos-islands-as-a-future-indian-ocean-spy-base-20120327-1vwo0.html>

¹⁷ Matthew Speiser & Michael B. Kelley. 2015. *Military & Defense: The 18 Most Hotly Contested Islands In The World*. Tersedia Dalam : <http://www.businessinsider.com/18-island-disputes-2015-4>

antara Cocos Islands dengan pusat pemerintahan Australia (selaku negara pemilik Cocos Islands) jauh lebih jauh dibandingkan dengan jarak pusat pemerintahan Indonesia yang merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Bahkan pusat pemerintahan negara pemilik Cocos Islands tidak berada pada kawasan Asia Tenggara.

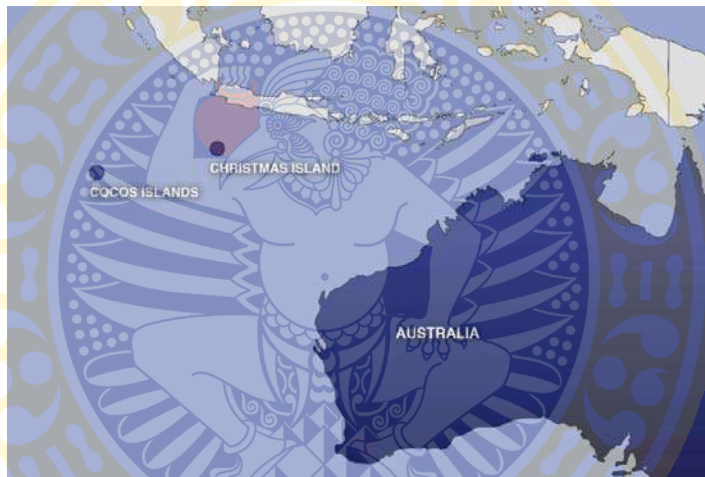
Gambar Bab I.3: *Cocos (Keeling) Islands / Christmas Islands Strategic Coverage / Exposure.*



Sumber: Kopp Carlo. 2013. *Strategic Potentially of the Cocos Islands and Christmas Islands*. Air Power. Defence Today, Defence Capabilities & Homeland

Security, pdf. Strike Publications Pty Ltd – PO Box 27 Amberley Qld 4306 – 07
3282 9019.

Gambar Bab I.4: Cocos (Keeling) Islands. Cocos Islands & Christmas Islands.



Sumber: <http://www.abc.net.au/news/image/428410-3x2-940x627.jpg>

Terkait dengan isu yang sedang berkembang di wilayah Asia yakni kondisi konflik sengketa Laut Cina Selatan dan Cina sebagai negara yang sedang mengalami peningkatan kekuatan yang sangat signifikan, maka dikhawatirkan pulau Cocos merupakan sarana pertama AS untuk memasuki Laut Cina Selatan dan melakukan kepentingannya yang berhubungan dengan Cina dan konflik sengketa Laut Cina Selatan.

Berhubungan dengan lokasi letak geografis serta posisi Cocos Islands yang berlokasi di Asia Tenggara, maka kebijakan AS yang bertujuan untuk menggunakan kawasan Cocos Islands sebagai sarana militer menimbulkan berbagai reaksi negara-negara kawasan. Beberapa negara yang bereaksi terhadap kebijakan penempatan pangkalan militer AS di Cocos Islands adalah Cina dan Indonesia. Secara khusus Cina bahkan telah menyoroti penuh agenda presiden Obama pada November 2011 yakni sejak kunjungan Sembilan hari pada kawasan Asia Tenggara dimana satu minggu setelah agenda kunjungan Sembilan hari tersebut Obama berencana bertolak ke Darwin untuk bertemu dengan perdana menteri Australia Julia Gillard terkait pembahasan implementasi kebijakan hubungan kerja sama militer antara AS dan Australia.¹⁸

Cina menunjukkan respon negatif terhadap kebijakan militer AS di Cocos Islands yang berarti merupakan sinyal kehadiran kekuatan tambahan baru bagi AS kawasan Asia Tenggara. Respon Cina tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Cina merasa terusik dan cenderung curiga atas kebijakan yang akan dilakukan kedua negara yakni AS dan Australia. Bagi Cina, persetujuan penggunaan Cocos Islands sebagai pangkalan militer AS merupakan bentuk dari keinginan AS untuk masuk dan sengaja terlibat dalam konflik sengketa Laut Cina Selatan yang sedang berkembang di kawasan Asia khususnya kawasan Asia Tenggara. Cina memandang bahwa kehadiran AS di Asia memiliki tujuan tersembunyi. Bahkan China's Official Xinhua News menuding bahwa AS sengaja ingin melibatkan diri pada beberapa perselisihan maritim kawasan dimana sebagian besar dari

¹⁸ Nakamura & Wan. *Obama Heads To Asia With Sharp Focus On China's Growing Power*.

perselisihan tersebut merupakan fokus dari kedaulatan dan keutuhan wilayah territorial Cina.¹⁹

"The United States is also trying to get involved in a number of regional maritime disputes, some of which concern China's sovereignty and territorial integrity," China's official Xinhua news.

Disamping itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina secara resmi mempertanyakan dengan keras terkait tindakan AS yang disinyalir sengaja melibatkan diri dalam persengkeetaan regional di Asia. Liu Weimin menyinggung bahwa sebuah penguatan militer dalam hal perluasan kekuatan militer apakah merupakan sebuah kepentingan bersama dari negara-negara kawasan, selain itu seandainya perluasan kekuatan militer tersebut merupakan kepentingan bersama kawasan, apakah dunia internasional layak untuk turut campur mendiskusikan hal tersebut.²⁰

"Whether strengthening and expanding a military alliance is in the common interests of the region's countries and the international community is worthy of discussion," China's Foreign Ministry Spokesman, Liu Weimin.

Selain itu, respon negatif yang lain juga disampaikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri Cina, Liu Zhenmin. Sangat jelas bahwa Beijing sangat tidak senang dengan keterlibatan Washington pada konflik sengketa Laut Cina Selatan, bahkan dalam kesempatan yang sama Liu menambahkan bahwa keterlibatan Washington dalam persengketaan Laut Cina Selatan tidak akan memberikan solusi ataupun

¹⁹ Rourke & Watts. *China Uneasy Over US Troop Deal in Australia*.

²⁰ Rourke & Watts. *China Uneasy Over US Troop Deal in Australia*.

jalan keluar namun hanya akan membuat kondisi konflik menjadi semakin kompleks.²¹

“Having forces from outside become involved would not help solve the issue and would make it more complicated,” warned Chinese Assistant Foreign Minister Liu Zhemin.

Negara lain selain Cina yang juga memberikan reaksi terhadap kebijakan penggunaan Cocos Islands sebagai pangkalan militer oleh AS adalah Indonesia. Indonesia merasa perlu untuk memberikan reaksi dikarenakan oleh posisi dan lokasi dari Cocos Islands yang berbatasan langsung dengan batas wilayah kedaulatan Republik Indonesia.²² Pada dasarnya Indonesia memahami bahwa maksud dan kepentingan dari pemerintah AS untuk menempatkan kekuatan militernya di seluruh penjuru dunia bukan merupakan wewenang Indonesia, namun reaksi tersebut dilakukan bertujuan untuk menghindari munculnya sebuah kesalah-pahaman antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS.²³ Indonesia secara khusus mencermati dari tujuan utama penempatan pangkalan militer AS di Cocos Islands yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat intai tanpa awak, dimana melalui juru bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Hartind Asrin, pemerintah Indonesia meminta penjelasan atas tujuan penempatan pesawat intai tanpa awak tersebut.²⁴

Kementerian pertahanan Republik Indonesia secara garis besar tidak hanya mempermasalahkan kehadiran militer AS di Cocos Islands namun juga

²¹ Ford. *China Gives Cool Response to US Military Activity in Australia.*

²² anon. 2012. *Indonesia Protes Pangkalan AS Di Pulau Cocos, Australia.* BBC Indonesia [Online]. Tersedia Dalam: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120329_indonesiaaussie.shtml

²³ BBC Indonesia. 2012. *Indonesia Protes Pangkalan AS Di Pulau Cocos, Australia.*

²⁴ BBC Indonesia. *Indonesia Protes Pangkalan AS Di Pulau Cocos, Australia.*

mempermasalahkan fungsi dari pesawat intai yang menjadi sarana utama militer AS. Kementerian pertahanan Republik Indonesia menekankan apabila pesawat intai milik AS memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia maka pemerintah Indonesia berencana melakukan tindakan pencegahan pesawat bersangkutan.²⁵ Masih terkait dengan permasalahan pesawat intai, Indonesia memandang bahwa dengan terdapatnya sebuah pangkalan militer AS di Cocos Islands akan membuat wilayah Indonesia menjadi rentan untuk dimasuki pesawat intai tersebut terlebih lagi, pesawat intai tersebut merupakan pesawat intai yang sulit dilacak.²⁶

Selain itu, tidak mengacuhkan pangkalan militer AS yang berada di tempat lain seperti pangkalan militer Diego Garcia, penempatan pangkalan militer AS di Cocos Islands juga dianggap sebagai bentuk kelanjutan dari serangkaian penempatan pangkalan militer AS di Guam dan Singapura dimana serangkaian kebijakan tersebut berhubungan dengan tujuan kepentingan utama AS yakni memperkuat pengaruhnya di Asia Pasifik.²⁷

Akan tetapi walaupun respon negatif atas kebijakan penggunaan Cocos Islands sebagai pangkalan militer AS telah muncul, AS masih bersikukuh meneruskan implementasi kebijakannya tersebut, bahkan pengiriman personel militer AS ke wilayah utara Australia terus berlanjut dan berencana memulai tahap operasi secepat mungkin. AS mengklaim bahwa kebijakan tersebut

²⁵ BBC Indonesia. *Indonesia Protes Pangkalan AS Di Pulau Cocos, Australia.*

²⁶ BBC Indonesia. *Indonesia Protes Pangkalan AS Di Pulau Cocos, Australia.*

²⁷ BBC Indonesia. *Indonesia Protes Pangkalan AS Di Pulau Cocos, Australia.*

merupakan bentuk kepanjangan dari kerjasama keamanan tiga negara yakni AS, Australia dan Selandia Baru yang dikenal dengan nama *Anzus defense treaty*.²⁸

Bahkan seolah menunjukkan bahwa respon-respon negara lain tidak dapat mengintervensi kebijakan AS tersebut, AS menyatakan bahwa seiring dengan semakin besar jumlah masuknya personil militer ke wilayah utara Australia tersebut maka angkatan udara AS akan memiliki akses luar biasa pada wilayah Australia bagian utara dan hal ini akan ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas angkatan udara AS terutama aktifitas penerbangan pesawat angkut militer AS di Australia bagian utara.²⁹

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah; apa yang menjadi tujuan kebijakan penempatan pangkalan militer AS di Cocos Islands, Australia?

²⁸ Rourke & Watts. *China Uneasy Over US Troop Deal in Australia*.

Dalam *Anzus defense treaty* dijelaskan bahwa perjanjian tersebut mengikat ketiga Negara yang terlibat untuk memberikan bantuannya apabila salah satu dari ketiga Negara yang termasuk dalam perjanjian mendapatkan serangan dari pihak lain. *Anzus defense treaty* tersebut telah berjalan sejak masa pasca perang dingin tepatnya pada tahun 1956 dimana dalam menanggapi berbagai respon Negara kawasan terkait penggunaan Cocos Islands sebagai pangkalan militer AS. AS beralih bahwa penempatan pangkalan militernya di bagian utara Australia merupakan sebuah kebijakan dalam rangka merayakan 60 tahun perjanjian *Anzus defense treaty*.

²⁹ Rourke & Watts. *China Uneasy Over US Troop Deal in Australia*.

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap alasan dan target kebijakan AS menempatkan pangkalan militer di Pulau Cocos Australia pada tahun 2012.

I.4 Kerangka Pemikiran

I.4.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah kebijakan atau yang dikenal dengan *Policy* secara harafiah merujuk pada sebuah tindakan lanjutan dari tujuan-tujuan yang diupayakan sebuah aktor dimana dalam hal ini aktor adalah negara.³⁰ Kebijakan luar negeri merupakan sebuah jumlah atau ringkasan dari tujuan dan tindakan pencapaian tujuan tersebut dalam politik global.³¹ Penekanan pada konteks *global politics* dalam definisi kebijakan luar negeri yang diberikan oleh Mansbach dan Rafferty tentu berhubungan dengan interaksi antar negara. Sedangkan dalam beberapa kondisi, kebijakan luar negeri adalah perpanjangan dari politik dalam negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri juga dapat diartikan sebagai kebijakan lanjutan ketika kepentingan domestik telah tercapai dan kebijakan luar negeri dimulai ketika kebijakan domestik berakhir.³² Sebagaimana diungkapkan oleh mantan presiden AS Henry Kissinger, "*foreign policy begins when domestic policy ends*".

³⁰ Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty. 2008. *Foreign Policy And War: Diplomacy And Negotiation. Available on Introduction To Global Politics*. Routledge. Madison Avenue, New York. Pp.,346

³¹ Richard Mansbach & Kirsten L. Rafferty. 2008. *Introduction To Global Politics*, 348

³² Wolfram F. Hanrieder. 1971. *Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays*. New York: David McKay Co., hal. 22.

Pembahasan kebijakan luar negeri suatu negara sangat berhubungan erat dengan *internal life* dan *external needs* dimana aspek kebutuhan eksternal ini mencakup keseluruhan dari aspirasi, atribut nasional kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, serta aktifitas rutin yang dilakukan berdasarkan tujuan untuk memelihara identitas sosial, hukum, serta geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.³³

Holsti juga mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri adalah segala bentuk aktifitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dengan tidak mengacuhkan kondisi dan keadaan internalnya, bahkan dalam beberapa kasus, kondisi internal justru dipergunakan untuk menyokong dan mendukung aktifitas negara bersangkutan demi tercapainya keuntungan dari lingkungan eksternalnya.³⁴

Jack C. Plano menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri cenderung memiliki hubungan dengan kondisi internasional yang sedang terjadi. Kebijakan luar negeri justru dibentuk untuk mencapai tujuan nasional suatu negara sedangkan tujuan nasional sendiri adalah hasil dari penggabungan antara tiga aspek yakni kebijakan luar negeri, kondisi dan situasi internasional yang sedang berkembang, serta *power* negara bersangkutan untuk menggapai tujuan nasional.³⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarafsirkan bahwasanya *power* suatu negara menentukan seberapa jauh dan luasnya kebijakan luar negeri, karena dalam merumuskan kebijakan luar negeri, negara juga telah menimbang apakah

³³ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 15.

³⁴ K.J. Holsti, 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta, hal. 21

³⁵ Jack C. Plano & Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 5

kebijakan luar negeri tersebut sangat mungkin untuk dicapai dengan kapabilitas kekuatan yang dimilikinya.

Berkaitan dengan kasus penempatan pangkalan perang AS di Pulau Cocos Australia apabila ditilik melalui sudut pandang AS, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh Rosenau, Holsti dan Plano karena dalam studi kasus penempatan pangkalan militer AS di Cocos Islands, AS memiliki *external needs*, dimana aspek kebutuhan eksternal ini mencakup aspek seperti atribut nasional kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, serta aktifitas rutin. AS juga memiliki *internal life* yang terkait dengan *external needs* dimana *internal life* tersebut tidak dapat diabaikan, namun dalam konteks penggunaan Cocos Islands sebagai pangkalan militer ini, kondisi internal AS digunakan untuk menyokong dan mendukung aktifitas AS dalam mencapai kepentingannya di Asia Tenggara.

Apabila menilik definisi kebijakan luar negeri Jack Plano yang mana kebijakan luar negeri memiliki kecenderungan hubungan dengan apa yang terjadi pada dunia internasional, dengan kata lain implementasi kebijakan luar negeri dapat didasarkan oleh kondisi internasional yang sedang berkembang. Berkaitan dengan kondisi internasional yang sedang terjadi, terdapat beberapa kondisi yang menyita perhatian AS, yakni konflik sengketa Laut Cina Selatan yang semakin memanas, kemudian ditambah dengan Cina yang sedang menumpuk kekuatannya terkait dengan konfrontasi yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan. Hal tersebut merujuk pada semakin meningkatnya aktifitas Cina yang terlihat pada tindakan Cina pada awal 2015 yang dipandang AS semakin berani dengan membangun

landasan pacu pesawat tempurnya di *Spartly Islands*.³⁶ Kemudian komitmen AS dalam menjaga stabilitas keamanan regional Asia Tenggara terkait Terrorisme. Isu keamanan terkait terrorisme di Asia Tenggara menjadi alasan kuat bagi AS untuk memfokuskan diri pada kawasan Asia Tenggara.

Dalam kasus penempatan pangkalan militernya di Cocos Islands, AS memiliki kebutuhan, kepentingan bahkan konflik serta kapabilitas namun yang tidak dimiliki adalah lokasi teritori yang terletak berdekatan langsung dengan target yakni Asia Tenggara. Dalam hal ini Cocos Islands adalah pilihan yang sangat strategis. Kebijakan pemilihan Cocos Islands menjadi pilihan tepat juga dikarenakan oleh faktor Australia sebagai sukutu baik AS.

I.4.2 Kebijakan dan Isu-isu Strategis

Secara umum kebijakan merupakan sebuah penentuan dan proses pembuatan keputusan untuk menentukan sebuah tujuan dari suatu kepentingan.³⁷ Sedangkan strategis berasal dari kata strategi dalam konteks militer yang berhubungan dengan teknik, cara, atau metode untuk memenangkan sebuah peperangan.³⁸ Secara terminologi, strategi sendiri mengacu pada definisi kata *strategia* yang berasal dari Yunani yang memiliki arti sebagai sebuah seni yang

³⁶ Manuel Mogato. *The US Wants Access To Philippine Military Bases As It Shifts Forces To Asia*.

³⁷ Mansbach & Rafferty. *Foreign Policy And War: Diplomacy And Negotiation*.

³⁸ Mansbach & Rafferty. *Foreign Policy And War: Diplomacy And Negotiation*.

Lihat juga Sondang P. Siagian. 2005. *Manajemen Strategis*. Jakarta. Bumi AKsara.

dilakukan para panglima perang.³⁹ Secara umum definisi mengenai strategi memang berada pada ranah pembahasan metode-metode pertempuran yang mengacu pada cara-cara panglima-panglima yang berada pada medan tempur untuk dapat memenangkan pertempuran-pertempuran dan menyelesaikan perang dengan kemenangan.⁴⁰

Isu strategis yang menjadi pusat perhatian dalam konteks global yang juga menyita perhatian AS dalam periode masa pemerintahan Obama adalah isu yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Asia khususnya Asia Tenggara, kemudian perkembangan negara-negara kawasan Asia dan Asia Tenggara menjadi daya tarik sendiri bagi pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Obama.⁴¹ Berbeda dengan kepentingan AS sebelumnya pada masa pemerintahan Bush yang menitik-beratkan kebijakan-kebijakan terkait agenda AS di Timur Tengah, maka AS pada masa kepemimpinan Obama melakukan perubahan fokus konsentrasi menuju kawasan Asia dan Asia Tenggara. Khusus dalam kawasan Asia Tenggara, AS meletakkan perhatian khusus bagi negara-negara kawasan yang sedang dalam proses pertumbuhan ekonomi yang pesat. AS memetakan negara-negara kawasan tersebut sebagai *fast-developing countries*.⁴²

Dalam konteks kerja sama dengan negara-negara kawasan, AS memiliki kebijakan strategis yakni *rebalancing strategy*.⁴³ Kebijakan penyeimbangan

³⁹ Carl Von Clausewitz. 1984. *On War*. Rev. ed., Edited and Translated by Michael Howard and Peter Paret, Princeton University Press.

⁴⁰ Carl Von Clausewitz. 1984. *On War*.

⁴¹ Nakamura & Wan. *Obama Heads To Asia With Sharp Focus On China's Growing Power*.

⁴² Nakamura & Wan. *Obama Heads To Asia With Sharp Focus On China's Growing Power*.

⁴³ Daniel R. Russel. 2014. *Penyeimbangan Kembali ke Asia Akan Terus Berlanjut*. Embassy of The United States. Jakarta. Indonesia. berita Dari Kedubes AS [online]. tersedia dalam:

kembali tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS yang baru yakni John Kerry dalam kunjungannya ke negara-negara ASEAN. John Kerry memandang bahwa kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri merupakan hal yang tidak berbeda, sehingga kebijakan strategis penyeimbangan kembali ke kawasan Asia menjadi sebuah prioritas utama.⁴⁴ Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan hubungan dengan 10 kepala negara-negara ASEAN ditambah pula dengan negara-negara kekuatan dunia seperti Cina, Jepang, Korea dan negara-negara Pasifik dan Australia.⁴⁵ Kebijakan *rebalancing* tersebut merupakan kebijakan strategis yang berhubungan dengan pemerintahan Obama yang meletakkan perhatian lebih pada kawasan Asia serta memandang bahwa keamanan dan kesejahteraan AS memiliki hubungan berkesinambungan dengan pembangunan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik.⁴⁶ Hal tersebut membuat presiden Obama menjadikan hubungan baik dengan negara-negara kawasan Asia menjadi sebuah prioritas masa pemerintahannya.⁴⁷

Isu lain yang menyita perhatian pemerintahan AS adalah konflik sengketa Laut Cina Selatan yang semakin memanas pada 2 tahun terakhir. Isu Laut Cina Selatan berhubungan dengan kebijakan penggunaan Cocos Islands sebagai pangkalan militer AS. Dalam konteks penempatan pangkalan militer AS di Pulau Cocos serta penggunaan pangkalan militer tersebut, AS memiliki sebuah strategi

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/embnews_140102id.html

Courtesy: http://www.huffingtonpost.com/daniel-r-russel/us-asia-rebalance-is-here-to-stay_b_4524853.html

⁴⁴ Daniel R. Russel. 2014. *Penyeimbangan Kembali ke Asia Akan Terus Berlanjut*.

⁴⁵ Russel. *Penyeimbangan Kembali ke Asia Akan Terus Berlanjut*.

⁴⁶ Russel. *Penyeimbangan Kembali ke Asia Akan Terus Berlanjut*.

⁴⁷ Russel. *Penyeimbangan Kembali ke Asia Akan Terus Berlanjut*.

Defense Policy.⁴⁸ Strategi tersebut sangat relevan dengan tujuan tindakan antisipatif AS terkait isu Laut Cina Selatan dan kekerasan dan Terrorisme di Asia Tenggara.

Terkait dengan tujuan penggunaan Cocos Islands sebagai pangkalan militer AS, AS tidak memiliki wilayah yang tepat untuk menjejakkan kakinya dalam rangka mencapai kepentingannya di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu maka AS menggunakan Cocos Islands yang notabene merupakan pulau kosong milik Australia yang berada tepat pada kawasan Asia Tenggara. Diletakkannya pangkalan militer AS di Cocos Islands membuat AS telah memiliki sarana dan prasarana di kawasan Asia Tenggara akan tetapi kembali dalam konteks *defense policy*, AS hanya dapat menungu dengan melakukan pengawasan pada target-target kepentingannya seperti kepentingan AS dalam konflik sengketa Laut Cina Selatan, kemudian kepentingan AS akan tindakan agresif Cina serta kepentingan AS terkait komitmen menjaga keamanan regional yang berpotensi terancam oleh pertumbuhan terrorisme di Asia Tenggara.

Letak kebijakan strategis *defense policy* AS terlihat dimana AS hanya dapat melakukan tindakan antisipatif tanpa langsung melakukan tindakan koersif terhadap target kepentingannya di Asia Tenggara baik kepentingan dalam sengketa Laut Cina Selatan serta kepentingan terkait terrorisme di Asia Tenggara. Sebagai contoh, walaupun Cina semakin agresif dalam persengketaan Laut Cina Selatan, AS tidak dapat semerta-merta melakukan tindakan koersif yang justru berpotensi memperburuk keadaan. AS tidak dapat mengacuhkan Dunia

⁴⁸ Mansbach & Rafferty. *Introduction To Global Politics*. Pp.,366

internasional dan hukum internasional. Apabila AS melakukan tindakan koersif lebih dulu maka tindakan tersebut tidak mendapat perlindungan payung hukum internasional karena menyerang terlebih dahulu tidak memiliki *right intention* dan *reasonable hope*.⁴⁹ AS tidak dapat semena-mena mengacuhkan prinsip *right intention* yang tercatat dalam '*jus ad bellum*' dimana apabila AS melakukan tindakan koersif terlebih dahulu, maka hal tersebut tidak sesuai dengan *right intention to wage of war*.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut pulalah maka AS hanya dapat melakukan manuver-manuver kekuatan militernya untuk membangun kekuatan sekaligus bersiap menghadapi situasi yang dapat saja terjadi secara mendadak, karena apabila AS melakukan tindakan yang ceroboh dengan melakukan serangan terlebih dahulu, maka tindakan tersebut tidak mendapat perlindungan payung hukum.

⁴⁹ Payung hukum perang. Dalam penjelasan mengenai 2 pembagian klasifikasi hukum perang yang dilakukan Mochtar Kusumaatmaja, terdapat klasifikasi yang disebut dengan '*Jus ad Bellum*'. '*Jus ad Bellum*' merupakan bahasa latin yang juga berarti sebagai hak untuk berperang (*Rights to Wage War*). Penjelasan definitive mengenai '*Jus ad Bellum*' adalah bahwa terdapat perundingan sebelum sebuah negara melibatkan diri dalam peperangan atau mengikuti peperangan. Perundingan tersebut bertujuan untuk menciptakan peperangan yang *justifiable* atau kondisi perang yang mendapat pembenaran, dan perjanjian internasional membatasi alasan pembenaran bagi sebuah negara untuk mendeklarasikan peperangan hal ini menjadi perhatian dari '*ju ad bellum*'. Beberapa kriteria dan prinsip yang menjadi perhatian adalah diantaranya terdiri dari *right authority*, *right intention*, *reasonable hope*, *proportionality* dan *last resort*.

⁵⁰ Dalam penjelasan *International Humanitarian Laws* dijelaskan bahwa hukum ini berasal dari *Laws of War* yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*Laws of Armed Conflict*) dan kemudian berkembang menjadi *International Humanitarian Laws* atau dikenal sebagai *International Humanitarian Laws Applicable in Armed Conflict*. Berkaitan dengan penjelasan tersebut Mochtar Kusumaatmaja membagi hukum perang pada dua klasifikasi yakni '*Jus Ad Bellum*' dan '*Jus In Bello*'.

Lihat Haryomataram. 1994. *Hukum Humaniter*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1994, hlm. 2-3

Lihat juga Carsten Stahn. 2007. '*Jus ad bellum*', '*jus in bello*'... '*jus post bellum*'? - *Rethinking the Conception of the Law of Armed Force*. *The European Journal of International Law Vol. 17 no. 5*. EjiL, All rights reserved. Tersedia Dalam: <http://www.ejil.org/pdfs/17/5/111.pdf>

I.4.3 Perubahan Kebijakan Luar Negeri AS dari Kawasan Timur Tengah kepada Kawasan Asia Tenggara

Sejak masa pemerintahan George W. Bush serta semenjak serangan *World Trade Center* pada September 2001, AS telah secara terbuka mendeklarasikan pernyataan perang terhadap Terrorisme dimana kemudian hal tersebut membawa kondisi dunia ke dalam era *War on Terrorism*. Terkait dengan hal ini, maka AS melakukan pemetaan yang memunculkan sebuah kawasan yang menjadi pusat implementasi *War on Terrorism* yakni kawasan *Middle East* (Timur Tengah). Kawasan tersebut dianggap sebagai sebuah kawasan yang menjadi pusat segala aktifitas serta pertumbuhan bibit terrorisme di seluruh dunia.

Pasca serangan 9/11 pada tahun 2001, pemerintah AS mengkonsentrasikan kekuatan militernya ada kawasan Timur Tengah dimana kawasan ini dianggap sebagai basis fundamental segala bentuk pertumbuhan, perkembangan hingga kegiatan terrorisme di seluruh dunia atau secara terang didefinisikan oleh AS sebagai *A Fundamental Base in Global War on Terrorism*.⁵¹ Berkaitan dengan *War on Terrorism*, penempatan pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah jelas memiliki alasan yang kuat. Akan tetapi muncul sebuah pertanyaan besar ketika pada tahun 2012 AS mulai menyempurnakan program penempatan pangkalan militernya di kawasan yang tergolong baru yakni kawasan Asia Tenggara lebih tepatnya di Cocos Islands, Australia. Kebijakan ini tergolong

⁵¹ Khoirunnisa.2013. *Kebijakan Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik 2009-2012*. Pdf.eJournal Hubungan Internasional, 2013, 1 (3): 589-604. ISSN 000-0000. Ejournal.hi.fisip-unmul.org. Tersedia Dalam: [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/e-Journal%20Khoirunnisa%20\(08-27-13-12-17-38\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/e-Journal%20Khoirunnisa%20(08-27-13-12-17-38).pdf)

berlangsung sangat cepat dimana setahun sebelumnya yakni pada tahun 2011 AS baru saja menyelesaikan penarikan pasukanya di Afghanistan dan Irak dimana penarikan pasukan tersebut dimulai pada tahun 2010 di saat gelombang demokrasi mulai tumbuh.⁵²

Perubahan kebijakan tersebut disinyalir disebabkan oleh semakin memanasnya hubungan antara negara-negara kawasan terkait persengketaan Laut Cina Selatan serta semakin rentannya stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara yang juga diperkeruh pertumbuhan gelombang terrorisme. Berkaitan dengan konflik sengketa Laut Cina Selatan, sebagian besar negara yang terlibat di dalam perselisihan klaim wilayah di Laut Cina Selatan menunjukkan kegelisahan dan kekhawatiran atas sepak terjang Cina yang dinilai semakin agresif. Bahkan dalam sela-sela kunjungan Obama ke negara-negara Pasifik, Obama menyatakan bahwa salah satu dari serangkaian agenda kunjungan tersebut adalah sekaligus untuk menenangkan negara-negara kawasan yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan dan juga sekaligus menegaskan bahwa AS merupakan kekuatan Pasifik yang akan mengambil tindakan atas permasalahan yang sedang berkembang tersebut.⁵³ Efek dari semakin memanasnya kondisi persengketaan tersebut bahkan juga membuat AS sesegera mungkin mengimplementasikan penarikan pasukan militer di Philippina sekaligus menon-aktifkan pangkalan-pangkalan militer AS di Philippina untuk kemudian mengeser personil militer tersebut pada kawasan Asia dalam.⁵⁴ Kebijakan tersebut merupakan bentuk kelanjutan dari kebijakan

⁵² Khoirunnisa. 2013. *Kebijakan Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik 2009-2012*.

⁵³ Nakamura & Wan. *Obama Heads To Asia With Sharp Focus On China's Growing Power*.

⁵⁴ Mogato. *The US Wants Access To Philippine Military Bases As It Shifts Forces To Asia*.

pergeseran poros yang dikenal dengan sebutan *Asia Pivot*. Perubahan poros Asia ini disampaikan langsung oleh *US Defense Secretary* Ash Carter dalam kesempatan pidatonya di Arizona dimana dalam kesempatan ini disebutkan bahwa *Asia Pivot* merupakan fase selanjutnya yang menjadi fokus dari Washington.⁵⁵

I.4.4 Regional Order

Pembahasan konsep *Regional Order* tidak dapat dilepaskan dari konsep *Regional Neighborhoods*. Pada dasarnya sebuah tatanan regional merujuk pada bentuk badan supranasional formal yang bersifat transnasional dimana badan tersebut merupakan bentukan negara-negara.⁵⁶ Konsep tatanan regional dapat terbentuk ketika negara-negara yang saling bertetangga memiliki kesepakatan mengenai kesamaan kepentingan atas sebuah sistem yang disepakati. Terbentuknya sebuah tatanan regional memungkinkan lahirnya sebuah otoritas di dalamnya.⁵⁷

Mengacu pada konsep tatanan pada dasarnya tidak berbeda dengan prinsip-prinsip organisasional dalam kehidupan bermasyarakat manusia dimana terdapat prinsip-prinsip organisasional seperti diantaranya yakni terdapatnya interaksi antar aktor.⁵⁸ Interaksi yang dimaksud dapat berupa kerja sama antar

⁵⁵ Mogato. *The US Wants Access To Philippine Military Bases As It Shifts Forces To Asia*.

⁵⁶ Miles Kahler. 2003. *Global Governance Redefined*. Paper Presented at The Conference on Globalization, the State, and Society. Washington University School of Law, St. Louis, 13-14 November 2003.

⁵⁷ Klaus Dingwerth & Philipp Pattberg. 2006. *Global Governance as Perspective on World Politics*. *Global Governance*, Vol. 1, No. 3, Sept.-Dec. 1, 95, Pp. 367-372

⁵⁸ Dingwerth & Pattberg. *Global Governance as Perspective on World Politics*.

negara atau justru sebuah konflik itu sendiri. Dalam konteks Asia Tenggara, negara-negara kawasan yang bertetangga merupakan aktor utama dari sebuah tatanan yang dibentuk. Berhubungan dengan prinsip organisasional maka terdapatlah sebuah pemandu agar interaksi yang dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusuhan.⁵⁹ Pemandu tersebut dapat berupa etika dan hukum.

Dunia global mengenal istilah hukum internasional dan etika global. Kedua hal tersebut ada dan dibentuk untuk dapat memandu sebuah interaksi dalam *international society* sehingga interaksi yang dilakukan antar aktor tidak saling bertabrakan dan merugikan aktor yang lain. Secara umum, *Guiding Ethics* dan *Guiding Law* tersebut merupakan sebuah manifestasi dari aturan yang dibuat oleh otoritas, maka dari itu mengapa dalam sebuah tatanan akan terdapat sebuah otoritas pusat.⁶⁰ Ketika otoritas dan legitimasi negara menjadi semakin lemah maka otoritas tatanan diharapkan dapat mengakomodir dan menjadi penengah dalam sebuah perselisihan.

Berhubungan dengan isu kawasan, regional sendiri berarti merupakan satu atau lebih *nation-state* yang memiliki kesamaan geografis dengan kata lain memiliki wilayah geografis yang berdekatan atau bertetangga (*neighborhood*), atau kesamaan kerja sama atau bahkan kesamaan konflik, yang memiliki saling ketergantungan antara satu sama lain (interdependensi). Dalam dunia internasional terbentuknya sebuah tatanan regional memiliki latar belakang yang berbeda.

⁵⁹ Dingwerth & Pattberg. *Global Governance as Perspective on World Politics*.

⁶⁰ Dingwerth & Pattberg. *Global Governance as Perspective on World Politics*.

Sebagai contoh dalam kasus *Free Trade Area* (FTA), *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *North Atlantic Free Trade Area* (NAFTA) ketiganya terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan ketergantungan yakni perekonomian. Tatanan regional muncul dikarenakan sistem internasional yang dinilai tidak berjalan dengan baik.

Dalam konflik Laut Cina Selatan, klaim-klaim wilayah yang dilakukan oleh masing-masing negara membuat sebuah kondisi dimana legitimasi negara menemui jalan buntu. Legitimasi negara tersebut pada dasarnya bertabrakan dengan legitimasi negara-negara lain yang terlibat dalam persengketaan yang sama. Dapat dilihat dalam tindakan Cina yang melakukan klaim wilayah dimana luas klaim tersebut mencakup klaim negara-negara lain. Tentu hal ini akan menimbulkan sebuah masalah yang tidak menemui solusi tanpa adanya sebuah otoritas yang dapat memberikan jalan tengah.

I.5 Argumentasi

Penelitian ini mengajukan argumentasi bahwa tujuan penempatan pangkalan militer AS di Cocos Islands, Australia adalah untuk mengantisipasi perubahan isu-isu strategis yakni perubahan tatanan dan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara yang berpotensi menimbulkan masalah-masalah keamanan regional bagi AS di kawasan Asia terutama Asia Tenggara. Isu-isu strategis tersebut yakni isu konflik sengketa Laut Cina Selatan serta isu keamanan terkait perkembangan terorisme di Asia Tenggara.

I.6 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif yakni berusaha menggali informasi yang mendalam mengenai fenomena yang diamati yakni fenomena kebijakan luar negeri AS di Asia Tenggara terkait penempatan pangkalan militer di Cocos Islands, Australia.

I.7 Jangkauan Penelitian

Penelitian berfokus pada kebijakan luar negeri AS pada masa pemerintahan presiden Barrack Obama yang sedang berjalan, dimulai dari 2009, dan dibatasi hingga tahun 2012 ketika Cocos Islands resmi digunakan sebagai pangkalan militer AS. Alasan dibalik penentuan jangkauan penelitian ini adalah informasi terkait alasan dan target kebijakan membutuhkan observasi mengenai apa yang terjadi sebelum dan setelah kebijakan dibuat terutama bila ada dokumen yang dirilis pasca implementasi kebijakan.

I.8 Teknik Analisa dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan informasi melalui literatur seperti buku, artikel, rekaman wawancara pejabat pemerintah, hingga laporan tahunan kementerian luar negeri

masing'masing negara, jurnal ilmiah, pendapat ahli serta teoritisi Hubungan Internasional. Data yang telah terkumpul kemudian disatukan untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dalam menjelaskan berbagai bentuk respon apa saja yang muncul dalam kasus terkait.

I.9 Sistematika Pembahasan

Argumentasi penelitian dieksplorasi dalam bab-bab pembahasan yang terdiri atas;

Dalam bab 2 penelitian membahas mengenai; Karakteristik dan kecenderungan umum kebijakan luar negeri AS di bawah presiden Barrack Obama; terutama apa saja isu strategis yang menjadi pusat perhatian dalam konteks global; Serta arti penting kawasan Asia Tenggara bagi Obama terutama dalam konteks keamanan dan militer.

Kemudian dalam bab 3 penelitian membahas mengenai; kondisi terkini dalam konflik Laut Cina Selatan serta implikasinya bagi AS; serta kekerasan dan terrorisme di Asia Tenggara, perkembangan terkini dan implikasinya bagi AS.

Setelah itu di dalam bab 4 penelitian akan memberikan kesimpulan yang berisikan analisis mengenai arti penting penempatan pangkalan militer AS di Cocos Islands bagi AS terkait dengan antisipasi isu-isu strategis yang telah dibahas di bab 2 dengan 3, sekaligus mengkonfirmasi argumentasi penelitian dan memberikan rekomendasi untuk riset lebih lanjut.